

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Kerja Praktek**

Penyelesaian piutang negara macet merupakan salah satu aspek penting dari pengelolaan keuangan negara yang memerlukan perhatian khusus agar dapat terselenggara efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Potensi piutang negara saat ini dirasakan sangat besar dan potensial, baik itu dari segi jumlahnya maupun dari segi kepentingan keuangan negara atau pemerintah untuk menyelamatkannya, sehingga terasa sangat relevan apabila semua unsur aparat dan atau institusi negara/pemerintah dapat bekerjasama dengan baik.

Penyelenggaraan pengurusan piutang negara itu sendiri, dalam penyelesaiannya memiliki keterkaitan dengan berbagai pihak. Sehingga keberhasilan keamanan keuangan negara dimaksud ditentukan pula oleh sikap, pandangan dan langkah yang ditempuh oleh berbagai instansi dan lembaga terkait.

Langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Bidang Piutang Negara di DJKN adalah membuat Pernyataan Bersama (kesepakatan penyelesaian hutang) dengan Penanggung Hutang (selanjutnya disebut dengan PH), menerbitkan Surat Paksa yang memaksa PH untuk membayar hutang dalam waktu

1 x 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa dan parate eksekusi 4, yang mana bila PH tetap tidak menyelesaikan hutangnya, Surat paksa tersebut akan dilanjutkan dengan secara penyitaan dan pelelangan terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan lain dari Penanggung Hutang maupun Penjamin Hutang, serta Paksa Badan (*gijzeling*) terhadap Penanggung Hutang yang sebenarnya mampu namun tidak mau dan tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan hutangnya.

Sehungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis laporan mengenai : “Prosedur Pengurusan Piutang Negara yang Macet oleh Bidang Piutang Negara di Kantor DJKN Bandung.”

## **1.2 Tujuan Kerja Praktek**

Adapun tujuan dari kerja praktek yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja sebab-sebab terjadinya piutang negara macet dalam praktik oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
2. Untuk mengetahui Prosedur Pengurusan Piutang Negara yang Macet oleh Bidang Piutang Negara di Kantor DJKN Bandung
3. Untuk mengetahui Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang kepada Para Debitur.

## **1.3 Kegunaan Kerja Praktek**

1. Bagi DJKN

Mendapatkan informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan sekiranya dianggap perlu.

## 2. Bagi peserta Kerja Praktek

- a. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja yang sesuai dengan program studi yang dijalannya.
- b. Menumbuhkan serta mengembangkan sikap profesional yang sangat diperlukan oleh seorang mahasiswa untuk memasuki dunia kerja.
- c. Menambah pengetahuan dan pemahaman di dunia kerja secara langsung.

## 3. Bagi Penulis

- a. Untuk menambah Wawasan, Keterampilan, Pengalaman dan Pengetahuan yang bersifat teoritis dan praktis, terutama di bidang prosedur penerbitan Surat Paksa.
- b. Laporan kerja praktek ini berguna sebagai salah satu syarat dalam menempuh Program Strata Satu (S1) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

### **1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek**

